

GOVERNMENT POLICY ANALYSIS OF PLASMA INDUSTRIAL DISTRICT PURBALINGGA HAIR AND EYELASH FALSE IN THE DISTRICT PURBALINGGA

CASE STUDY OF SUBDISTRICT PENGADEGAN IN 2005-2015

ABSTRACT

Analysis of government policies Purbalingga it on the plasma industry hair and false eyelashes Purbalingga case studies Subdistrict Pengadegan in 2005-2015 has the aim to find out why the selected pattern hair industry plasma and false eyelashes in Purbalingga, knowing how to develop the plasma industry and knowing how the plasma acts as a forum for community empowerment.

Methods in this research use qualitative research with the main data types are the words and actions. Sources of data obtained derived from primary and secondary data. To search for informants in this study is conducted with a purposive sample (making intentional) and snowball sampling (sampling through the help of key informants to identify the source of the next informant who is still involved in the research). Techniques for collecting data later using interviews, observation and documents.

Interim findings in this study is nothing law that regulates the implementation of industrial plasma hair and false eyelashes. The condition causes there are two patterns in the implementation of plasma in the Subdistrict Pengadegan. The second pattern is the pattern of such branches and collector pattern. There is a loss and the benefits derived from the two patterns.

The results of this study are expected later can be beneficial for the government as a policy evaluation, for the people especially those plasma workers to be motivated establish industrial enterprises hair and false eyelashes.

Keywords: Government Policy, Plasma Hair and Eyelashes

1. Pendahuluan

Kabupaten Purbalingga memiliki potensi industri yang cukup besar dengan dukungan hasil pertanian yang cukup melimpah sebagai bahan baku industri, tenaga kerja produktif yang cukup, pangsa pasar yang masih terbuka dan iklim usaha yang kondusif. Dalam rangka upaya pembangunan ekonomi daerah, inventarisasi potensi wilayah (daerah) mutlak diperlukan agar dapat ditetapkan kebijakan pola pengembangan baik secara sektoral maupun multisektoral. Salah satu langkah inventarisasi potensi ekonomi daerah adalah dengan menginventarisasi produk-produk potensial, andalan dan unggulan daerah tiap-tiap sub sektor serta tingkat Kabupaten. Sesuai dengan keputusan Bupati Purbalingga Nomor 500/30 Tahun 2004, industri kerajinan rambut merupakan salah satu produk unggulan daerah Kabupaten Purbalingga¹.

Sejarah kerajinan rambut palsu di Kabupaten Purbalingga berawal dari Desa Karangbanjar tahun 1956. Semakin lama usaha rambut tersebut semakin maju, pada tahun 1970 an dikembangkan menjadi usaha satu desa. Hingga akhirnya Desa Karangbanjar terkenal dengan sentra usaha kerajinan rambut. Hal ini membuat para investor luar negeri yang mulai masuk Kabupaten Purbalingga tahun 1980 an, mengincar Desa Karangbanjar untuk mendapatkan bahan rambut semi jadi.

Kerajinan rambut dan bulu mata palsu di Kabupaten Purbalingga saat ini semakin menguat dan tersebar di seluruh Kabupaten Purbalingga, terutama untuk perusahaan-perusahaan besar baik PMA maupun swasta Nasional. Data Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang berkonsentrasi di

¹ Dinperindagkop Kabupaten Purbalingga. 2010. Laporan Akhir Profil UMKM Kabupaten Purbalingga. Purbalingga : Dinperindagkop Purbalingga. Hal 102

industri rambut mengalami peningkatan. Pada Tahun 2009 terdapat 17 perusahaan asing rambut dan bulu mata palsu dengan 20.772 pekerja, lalu meningkat pada tahun 2015 menjadi 20 perusahaan asing dengan 27.798 pekerja.

Jumlah perusahaan industri rambut Kabupaten Purbalingga yang tercatat oleh Pemerintah Daerah hingga Tahun 2015 baik yang PMA maupun swasta Nasional adalah 41 perusahaan dengan jumlah pekerja adalah 32.470 orang. Mengingat jumlah perusahaan yang semakin bertambah ditambah dengan proses pembuatan rambut dan bulu mata palsu yang memerlukan tahapan yang panjang, maka pada Tahun 2004 masa kepemimpinan Bupati Triyono Budi Sasongko beliau berinisiatif untuk memberdayakan masyarakat yang menganggur agar mau diberi keterampilan membuat rambut dan bulu mata palsu. Inisiatif tersebut dituangkan dalam Kebijakan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025. Berdasarkan visi Kabupaten Purbalingga yaitu Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia, salah satu misi yang diusung untuk mencapai visi adalah mewujudkan ekonomi masyarakat Purbalingga yang semakin meningkat dan berkeadilan. Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengeluarkan beberapa butir kebijakan saat itu untuk membantu ketercapaian perekonomian masyarakat Purbalingga yang terus meningkat diantaranya dengan penguatan industri kecil sebagai sumber kekuatan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut yang melatarbelakangi di dirikannya plasma industri rambut dan bulu mata palsu di Kabupaten Purbalingga.

Kecamatan Pengadegan merupakan salah satu lokasi yang dipilih Pemerintah Kabupaten saat itu untuk didirikan plasma rambut dan bulu mata palsu. Hal ini dikarenakan pegawai pemerintah Kecamatan Pengadegan yang sangat antusias dan mau

membantu memotivasi masyarakat untuk membuat kerajinan rambut dan bulu mata palsu. Tidak ada motif ekonomi dalam pembangunan plasma industri rambut dan bulu mata palsu ini, melainkan tujuan utamanya adalah untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Purbalingga. Plasma rambut dan bulu mata palsu setiap tahun mengalami peningkatan, jumlah terakhir plasma industri rambut dan bulu mata palsu di Kecamatan Pengadegan menurut penelitian KPMPT tahun 2012 adalah 40 plasma dengan 430 pekerja. Terdapat beberapa faktor yang mendorong peningkatan jumlah plasma diantaranya adalah dukungan dari pemerintah dan kemauan dari masyarakat untuk bekerja.

Peran pemerintah baik dalam kebijakan ataupun rencana strategis pasti sangat berpengaruh dalam pengembangan industri. Perlu dilakukan penelitian dalam rangka untuk mengetahui alasan industri rambut dan bulu mata memilih pola plasma guna mengembangkan produk industrinya, selain itu juga untuk mengetahui bagaimana plasma industri rambut dan bulu mata palsu berkembang (terutama di Kecamatan Pengadegan) dan bagaimana plasma dapat menjadi sarana pemberdayaan masyarakat. Disamping itu juga untuk mengetahui bagaimana kebijakan dan peran Pemerintah Kabupaten dalam hal pengembangan plasma industri rambut dan bulu mata palsu dan bagaimana pola hubungan plasma yang terjalin antara inti plasma terutama di Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga.

2. Teori dan Metoda

2.1 Teori

Pada penelitian Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tentang Plasma Industri Rambut dan Bulu Mata Palsu di Kabupaten Purbalingga,

Studi Kasus Kecamatan Pengadegan ini fokus penelitian berada pada pola inti plasma yang dijalankan. Menurut Makka (2005) pola kemitraan usaha dapat dilakukan dengan 5 cara diantaranya : pola inti-plasma, pola subkontrak, pola dagang umum, pola keagenan, pola kerjasama operasional agribisnis (KOA)². Kemitraan dengan pola inti plasma merupakan hubungan kerjasama antara kelompok dengan perusahaan, dimana perusahaan bertindak sebagai inti dan kelompok sebagai plasma. Inti plasma ini juga dijelaskan pada UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada pasal 27 tentang kemitraan. Pada UU tersebut dijelaskan bahwa usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi plasmanya dalam penyediaan dan penyiapan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha, perolehan dan peningkatan teknologi, pembiayaan, pemasaran, penjaminan, pemberian informasi.

Dalam rangka membangun kemitraan usaha dalam hal ini pola inti plasma, peran pemerintah sangat diperlukan dalam beberapa aspek, diantaranya³ mengarahkan kelembagaan ekonomi untuk menjadi bagian dari jaringan kerjasama, membuat perangkat hukum yang mendukung perkembangan kemitraan usaha terutama yang ditujukan untuk melindungi hak-hak individu pekerja plasma dari bahaya eksploitasi pemodal besar, menciptakan kondisi yang kondusif seperti pembangunan prasarana ekonomi, pengajian dan penerapan

2 Makka, Dj. 2005. *Prospek Pengembangan Sistem Integrasi Peternakan yang Berdaya Saing*. Makalah. Dipresentasikan pada Seminar Nasional Integrasi Tanaman Ternak di Denpasar (20-22 Juli 2005) : 18-31

3 Sudaryanto, T dan T. Pranadji. 1999. *Peran Kewirausahaan dan Kelembagaan (Kemitraan) Dalam Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Pangan*. Makalah. Dipresentasikan pada Simposium Penelitian Tanaman Pangan IV di Bogor (22-24 November 1999) : 14

teknologi, pengembangan sistem informasi pasar, membuat suatu *pilot project* dengan tahap awal melibatkan BUMN, koperasi dan kemitraan usaha di daerah.

Istilah kemitraan inti-plasma ini dimaksudkan sebagai usaha pengembangan yang dilandasi kerjasama antara perusahaan inti dengan plasma yang dalam hal ini dapat berupa peternak plasma atau kumpulan masyarakat yang bekerja sebagai plasma industri⁴. Kerjasama ini pada dasarnya adalah kerjasama vertikal atau *vertical partnership*⁵. Plasma menghasilkan bahan baku dan perusahaan sebagai *partner* melakukan pengolahan untuk menghasilkan produk akhir. Definisi plasma rambut dan bulu mata palsu adalah plasma rambut dan bulu mata palsu merupakan bagian dari industri rambut dan bulu mata palsu yang mengerjakan sebagian tahapan dari proses industri untuk menghasilkan produk rambut dan bulu mata palsu yang berkualitas (Widji Tri S, 2015).

Jenis plasma rambut dan bulu mata palsu di Kabupaten Purbalingga terbagi menjadi dua yaitu cabang dan pengepul. Dalam praktik kerjanya tidak ada yang berbeda antara dua jenis tersebut namun yang membedakan adalah peraturan yang ditetapkan.

2.2 Metoda

Pada penelitian tentang Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga tentang plasma industri rambut dan bulu mata palsu di Kabupaten

4 Mudjoko, K., Muladno. 1999. Pembangunan Industri Sapi Potong Pada Era Pasca Krisis. Makalah. Dipresentasikan pada Seminar Nasional Peternakan dan Veteriner di Bogor (1-2 Desember): 17-26

5 Sudaryanto, T., Y. Yusdja, E. Basuno dan Saptana. 1999. Analisis Kebijakan Industri Ayam Ras Setelah Krisis Moneter. Makalah. Dipresentasikan pada Seminar Nasional Peternakan dan Veteriner di Bogor (1-2 Desember): 17-26

Purbalingga studi kasus di Kecamatan Pengadegan, menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah Sembilan desa di Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga. Kecamatan Pengadegan dipilih karena hampir seluruh ibu rumah tangga di Kecamatan Pengadegan berprofesi sebagai pengrajin rambut dan bulu mata palsu, disamping itu Kecamatan Pengadegan merupakan lokasi pertama yang dituju Pemerintah kala itu untuk dibangun dan dikembangkan plasma.

Subjek penelitian diantaranya adalah pihak Pemerintah Kabupaten yang terkait dengan plasma industri rambut dan bulu mata palsu, pihak masyarakat yang diwakili oleh buruh plasma di Kecamatan Pengadegan, dan beberapa pimpinan perusahaan rambut dan bulu mata palsu. Teknik pengambilan informan dengan sistem *purposive sample* (pengambilan dengan sengaja) untuk memperoleh *key informan* (orang-orang yang mengetahui dengan benar dan terpercaya). Disamping itu juga peneliti juga menggunakan sistem *accidental sampling* (pengambilan dengan ketidaksengajaan saat bertemu di lokasi penelitian) pada beberapa responden dalam hal ini masyarakat yang bekerja di plasma, Pemerintah Desa, atau Pemerintah Kabupaten yang paham tentang plasma industri rambut dan bulu mata palsu di Kabupaten Purbalingga.

Jenis data pada penelitian ini sesuai dengan Lofland (1984:47) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain⁶. Semua jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif bersumber dari data primer dan data

⁶ Dr. Lexy J. Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Bandung : Remaja Rosdakarya. hal 112

sekunder⁷. Data primer diperoleh dengan cara dikumpulkan secara mandiri oleh peneliti langsung dari informan penelitian utama, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, biasanya berasal dari media atau internet. Dalam teknis pelaksanaan pengumpulan data, peneliti akan menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan informasi yang jelas. Metode tersebut diantaranya wawancara mendalam (*indepth interview*), dokumen dan observasi.

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah untuk kemudian dijadikan susunan yang padu dalam penelitian kualitatif. Setelah data terkumpul, peneliti akan melakukan pemilahan dan penyusunan klasifikasi data. Mana data yang memang diperlukan dalam menunjang kasus ini, dan mana yang tidak menunjang data ini. Kemudian setelah dilakukan proses pemilahan, akan dilakukan pemberian kode data untuk membangun kinerja analisis data. Setelah itu melakukan pendalaman data dan langkah terakhir adalah melakukan analisis data sesuai dengan konstruksi pembahasan hasil penelitian nantinya. Dalam melakukan analisis data adalah dengan cara reduksi data, lalu data disajikan dan dari data yang disajikan tersebut ditarik kesimpulan.

3. Hasil Penelitian

3.1 Industri rambut dan bulu mata palsu Kabupaten Purbalingga memilih pola plasma

Dipilihnya pola plasma guna mengembangkan industri rambut dan bulu mata palsu di Kabupaten Purbalingga karena beberapa faktor. Diantaranya adalah

⁷ Anonim. [Eprints.walisongo.ac.id/761/4/082411129_Bab3.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/761/4/082411129_Bab3.pdf). diunduh pada 27 Januari 2015. Pukul 23.23

karena banyaknya masyarakat Purbalingga pada saat itu yang masih menganggur dan pemerintah tidak memiliki cukup anggaran untuk membuka lapangan kerja dan menggaji para pekerja. Disamping itu faktor terkuat lain, karena Purbalingga sudah ramai dengan berkembangnya perusahaan rambut dan bulu mata palsu baik yang bersifat perusahaan asing (PMA) ataupun swasta nasional (PMDN). Jumlah perusahaan yang banyak, dengan target produksi yang terus meningkat tentu berdampak pada pengoptimalan tenaga kerja. Hal ini dinilai bisa dijadikan peluang oleh Pemerintah Kabupaten untuk memberi akses pekerjaan kepada masyarakat melalui industri rambut dan bulu mata palsu. Disisi lain perusahaan dapat menekan biaya produksi terutama yang terkait dengan tenaga kerja, jika mereka berhasil membukan jaringan mitra plasma. Beberapa pertimbangan tersebut melahirkan kebijakan yang mengacu pada pengoptimalan SDM sebagai tenaga kerja yang di aplikasikan melalui sistem plasma.

Visi misi Kabupaten Purbalingga yang tertera dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2005-2025 yaitu Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia. Terkait dengan visi tersebut salah satu butir misi yang diusung untuk mencapai visi adalah mewujudkan ekonomi masyarakat Purbalingga yang semakin meningkat dan berkeadilan. Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengeluarkan beberapa butir kebijakan untuk membantu ketercapaian perekonomian masyarakat Purbalingga yang terus meningkat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025. Pada kebijakan tersebut salah satu yang disebutkan adalah peningkatan keterampilan dan akses tenaga kerja terhadap lapangan kerja,

perlindungan tenaga kerja dan peningkatan hubungan industrial. Disamping itu juga salah satu bentuk kebijakannya adalah Peningkatan peran industri sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan industri kecil menengah dan industri padat karya yang memanfaatkan potensi sumber daya lokal, memiliki nilai tambah tinggi, dan ramah lingkungan, untuk semakin memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dengan Program Pengembangan Sentra Industri Potensial, Program Peningkatan Kapasitas Iptek dalam Sistem Produksi, Industri Kecil dan Menengah.

3.2 Pengembangan Plasma Industri Rambut dan Bulu Mata Palsu di Kecamatan

Pengadegan

Pada tahun 2005 plasma rambut dan bulu mata palsu pertama di gagas untuk di bentuk dan dilaksanakan. Lokasi pertama yang menjadi tempat pelaksanaan plasma rambut dan bulu mata palsu adalah Kecamatan Pengadegan. Perkembangan plasma di Kecamatan Pengadegan tumbuh secara signifikan, hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah plasma dan pekerja plasma di Kecamatan Pengadegan. Pada saat tahun 2005 hanya terdapat 3 plasma dengan jumlah pekerja tidak sampai 20 orang, tahun 2012 meningkat menjadi 40 plasma dengan jumlah pekerja 430 orang dan pada tahun 2015 berubah menjadi 73 plasma dengan jumlah pekerja 895.

Peningkatan jumlah plasma dan pekerja nya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah kebutuhan ekonomi yang mendesak, tingginya angka pengangguran, perkiraan efektifitas biaya, mudahnya persyaratan untuk tergabung di plasma. Bentuk koordinasi yang terbangun sampai saat ini di plasma rambut dan bulu mata palsu Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga hanya melibatkan

perusahaan dan korrinator plasma saja. Belum terlihat peran pemerintah dalam proses pelaksanaan plasma industri. Sehingga jaringan yang terbangun hanya sebatas instruksi dari perusahaan (inti) kepada pekerja (plasma) untuk membuat bahan baku produksi. Bahan baku yang sudah selesai dibuat, maka di serahkan kepada perusahaan untuk dilakukan *finishing*. Bentuk kerjasama yang terbangun adalah *vertical partnership*, dan plasma akan merasa kesulitan jika ingin memberikan komplain atau masukan kepada perusahaan.

Pekerjaan yang dilakukan oleh buruh plasma rambut dan bulu mata palsu adalah merangkai helai-helai rambut dengan sistem cuthik (*knitting*) untuk mendapatkan rangkaian rambut yang sejajar dengan tebal rambut yang sama, panjang yang sama, dan dibentuk sesuai dengan pesanan. Setelah dirangkai, dirapikan dan dibentuk sesuai pesanan, maka hasil *knitting* tersebut diserahkan kepada perusahaan untuk diselesaikan menuju tahapan selanjutnya.

Terdapat dua pola plasma yang ada di Kecamatan Pengadegan yaitu plasma pengepulan dan plasma cabang. Diantara kedua plasma tersebut terdapat perbedaan yang kentara, diantara perbedaan tersebut adalah

Tabel 3.1 Perbedaan Sistem Kerja Antara Pengepulan dan Cabang di Kecamatan Pengadegan

No	Perihal	Cabang	Pengepul
1.	Jam Kerja	Kerja buruh cabang sehari adalah 7 jam, biasanya dari jam 08.00 sampai dengan jam 15.00. jam istirahat hanya setengah jam yaitu pukul 12.00-12.30	Tidak ada jam kerja, asalkan target produksi dapat tercapai dan bisa diserahkan pada waktu yang ditentukan.
2.	Status buruh	Sama dengan pengepul, status buruh adalah buruh borongan yang mana upahnya pun borongan sesuai jumlah produksi.	Sama dengan cabang, status buruh adalah buruh borongan yang mana upahnya pun borongan sesuai jumlah produksi.

3.	Status koordinator	Menjadi pegawai pabrik, sehingga mendapat hak yang sama dengan buruh pabrik, seperti mendapat gaji sesuai UMR dan mendapat jaminan kesehatan (Jamkesmas)	Sama statusnya dengan buruh pengepul dan buruh cabang, hanya sebagai pekerja borongan dan mendapat uang dari keuntungan setiap hasil buruh.
4.	Penggunaan seragam	Sama seperti pegawai pabrik, setiap buruh cabang diberi seragam untuk dikenakan selama kerja ada juga haris dimana harus menggunakan pakaian batik.	Tidak ada seragam, asalkan produk jadi maka hasil akan turun.
5.	Jumlah pekerja	Minimal jumlah buruh harus 50 orang baru bisa menjadi cabang. Jika dibawah 50 orang hanya bisa menjadi pengepul.	Jumlah buruh biasanya tidak lebih dari 20 orang.
6.	Keterikatan dengan pabrik	Cabang sangat terikat dengan pabrik, semua peraturan yang ada di pabrik juga diberlakukan di cabang. Hanya beda nya cabang terletak di dekat tempat tinggal sehingga bekerja bisa mengirit di biaya transportasi.	Tidak ada keterikatan yang kuat dengan pabrik. Sebatas kontrak mau menjadi pengepul dan bisa menyetorkan hasil kerajinan setiap hari.
7.	Tempat kerja	Dalam berproduksi, buruh cabang harus menyelesaikan tugas di tempat cabang, jika target tidak selesai sampai jam kerja habis baru boleh diselesaikan dirumah.	Bisa berproduksi dirumah asalkan target yang diminta dapat terpenuhi. jadi datang ke tempat pengepulan hanya untuk menyetorkan hasil produksi.

Sumber : Hasil observasi di plasma Sembilan Desa di Kecamatan Pengadegan, tahun 2015

Terdapat ketimpangan yang terjadi pada kelompok cabang, dimana mereka dipekerjakan sebagai buruh borongan tapi mereka mendapat peraturan yang mengikat layaknya pegawai pabrik. Pada prinsipnya kedua pola plasma tersebut

sama-sama masih dalam kondisi tertinggal dan sulit untuk mengembangkan usahanya. Hal ini dilandasi karena beberapa faktor, diantaranya tidak ada payung hukum yang jelas dari Pemerintah Daerah terkait peraturan hak, kewajiban, buruh plasma dan perusahaan serta sistematis pelaksanaan plasma. Koordinasi yang terbangun bersifat *vertical partnership* tanpa melibatkan pemerintah juga merupakan salah satu kendala yang didapatkan, dana APBD tidak mendukung untuk pengelolaan plasma sehingga bimbingan dan pengawasan terhadap plasma tidak optimal.

3.3 Peran Plasma Industri Rambut dan Bulu Mata Palsu Sebagai Sarana Pemberdayaan Masyarakat

Plasma rambut dan bulu mata palsu sangat berperan penting sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, diantaranya plasma rambut dan bulu mata palsu sebagai ruang aktualisasi masyarakat sehingga sangat bermanfaat bagi penyaluran bakat dan potensi masyarakat, selain itu plasma juga dijadikan sebagai wadah penyerapan tenaga kerja, dan sebagai media transfer pengetahuan serta teknologi. Selain itu juga plasma sebagai mediator peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perangsang tumbuhnya usaha lain.

Plasma rambut dan bulu mata palsu ternyata juga memiliki dampak buruk, diantaranya pada sektor sosial angka perceraian bertambah, pada sektor kesehatan tingkat kesehatan mata buruh plasma yang bekerja lebih dari setengah tahun pasti mengalami penurunan. Pada sektor pendidikan, tidak sedikit anak usia wajib sekolah memilih untuk bekerja menjadi buruh rambut dibandingkan melanjutkan pendidikan, gaya hidup masyarakat terutama remaja menjadi lebih hedonis sehingga adanya iklim kompetisi untuk mengunggulkan gaya hidup.

4. Pembahasan

Garis besar dari hasil penelitian jika di korelasikan dengan teori inti plasma, maka terdapat beberapa kondisi yang berjalan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Dalam bagan hubungan pola inti plasma harus melibatkan perusahaan sebagai inti (perusahaan rambut dan bulu mata palsu), pemerintah sebagai penengah (Pemerintah Kabupaten, Kecamatan atau Desa), dan kelompok masyarakat yang bekerja sebagai plasma (masyarakat Kecamatan Pengadegan yang bekerja sebagai buruh plasma).

Hubungan mitra yang dilakukan harus sejajar dan saling menguntungkan dengan melibatkan pemerintah. Fungsi pemerintah antara lain untuk menjadi penengah jika dalam pelaksanaan terdapat suatu permasalahan yang tidak dapat terselesaikan. Kenyataan yang terjadi di lapangan hanya ada perusahaan dan kelompok plasma yang berperan aktif, sedangkan pemerintah tidak terlibat terlalu banyak. Sehingga jika terdapat ketimpangan yang terjadi di lapangan seperti adanya cabang dan pengepulan akan berdampak pada kerugian buruh plasma, dan pemerintah tidak bisa menyelesaikan secara cepat karena sistem tersebut sudah ditanamkan dan dibudayakan sejak lama.

Salah satu syarat yang harus dilakukan oleh inti kepada plasma adalah memberi ilmu pengetahuan baru terkait teknologi dan wawasan usaha. Hal ini dirasakan oleh buruh plasma di Kecamatan Pengadegan, sehingga adanya transfer teknologi dapat membantu beberapa buruh plasma yang memiliki kemauan gigih untuk memandirikan usahanya. Alhasil terdapat beberapa koordinator plasma yang saat ini berhasil membuka usaha secara mandiri sehingga membantu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat lain.

5. Kesimpulan

Dipilihnya pola inti plasma untuk mengembangkan industri rambut dan bulu mata palsu antara lain karena banyak masyarakat Purbalingga yang masih menganggur saat itu masih banyak, industri rambut dan bulu mata palsu telah menjamur di Purbalingga,

perusahaan dapat menekan biaya produksi, pemerintah dapat menggerakkan ekonomi rakyat yang bertumpu pada pengoptimalan SDM. Plasma rambut dan bulu mata palsu di Kecamatan Pengadegan mengalami perkembangan di antaranya, tahun 2012 jumlah plasma 40 plasma dengan 430 pekerja dan pada bulan November tahun 2015 tercatat terdapat 73 plasma dengan menyerap 895 pekerja.

Plasma rambut dan bulu mata palsu di Kecamatan Pengadegan pada khususnya dan Kabupaten Purbalingga pada umumnya menerapkan dua jenis pola yang berbeda. Pola tersebut adalah plasma pengepulan dan plasma cabang. Dampak positif dari adanya plasma rambut dan bulu mata palsu antara lain sebagai ruang aktualisasi bagi masyarakat, menekan angka pengangguran, meningkatkan kesejahteraan finansial masyarakat, menggerakkan ekonomi kerakyatan yang berpangkal pada potensi masyarakat, mempercepat proses produksi sehingga meningkatkan pendapatan industri, merangsang tumbuhnya usaha lain, dan memberdayakan masyarakat dengan adanya transfer teknologi

Dampak negatif dari plasma industri rambut dan bulu mata palsu adalah peningkatan angka perceraian disebabkan terjadinya pertukaran tugas dalam rumah tangga dan masih kurangnya lapangan kerja untuk laki-laki. Para pengrajin rambut dan bulu mata palsu mengalami kerusakan pada mata. Anak dibawah umur (usia wajib sekolah) yang berhenti dari bangku pendidikan hanya untuk bekerja sebagai buruh plasma.

Terkait dengan misi Kabupaten Purbalingga, yaitu mewujudkan ekonomi masyarakat Purbalingga yang semakin meningkat dan berkeadilan, kebijakan untuk membantu ketercapaian perekonomian masyarakat Purbalingga yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 sebagian besar dapat terlaksana dengan baik. Fungsi pemerintah Kabupaten untuk memberikan fasilitasi dan intermediasi telah dilaksanakan secara intensif walaupun pada awal waktu. Untuk fungsi regulasi

belum terlaksana oleh Pemerintah Kabupaten, padahal regulasi ini merupakan kunci terpenting sebagai arah pelaksanaan suatu kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Basrowi, Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta

Dantes, Nyoman. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Dewanto, Agus Adi. 2005. *Perjanjian Kemitraan dengan Pola Inti Plasma Pada Peternak Ayam Potong/Broiler di Pemerintah Kabupaten Grobogan Jawa Tengah*. Tesis. Universitas Diponegoro

Fadjar, U. 2006. *Kemitraan Usaha Perkebunan : Perubahan Struktur yang Belum Lengkap*. Bogor : Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta : Erlangga

- Latief, Dochak. 2000. *Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi Global*. Surakarta : Muhammadiyah University Pers
- Lala M Kolopaking. 2002. *Kemitraan Dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Skala Kecil/Gurem*. Makalah. Dipresentasikan pada Lokakarya Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui SInergisitas Pengembangan Kawasan di Jakarta
- Michael Quinn Patton. 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Bab 5. Yogyakarta
- Mountjay, Alan.B. 1983. *Industrialisasi dan negara-Negara Dunia Ketiga*. Jakarta : PT. Bina Aksara
- Moelong Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Makka, Dj. 2005. *Prospek Pengembangan Sistem Integrasi Peternakan yang Berdaya Saing*. Makalah. Dipresentasikan pada Seminar Nasional Integrasi Tanaman Ternak di Denpasar (20-22 Juli 2005)
- Mudjoko, K., Muladno. 1999. *Pembangunan Industri Sapi Potong Pada Era Pasca Krisis*. Makalah. Dipresentasikan pada Seminar Nasional Peternakan dan Veteriner di Bogor (1-2 Desember)
- Prasetyo & J.C Setyoko. 2007. *Pendopo Untuk Rakyat; Jejak Langkah Bupati Sejuta Ide*. Purbalingga
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: ArRuzz Media
- Satori, Djam'andan Aan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA
- Sri Rejeki Hartono. 1997. *Menuju Pada Kemitraan yang Harmonis dan Berdaya guna*. Makalah. Dipresentasikan pada Lokakarya Kemistraan Usaha yang Berkesinambungan di Semarang (13 September 1997)
- Sudaryanto, T dan T. Pranadji. 1999. *Peran Kewirausahaan dan Kelembagaan (Kemitraan) Dalam Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Pangan*. Makalah. Dipresentasikan pada Simposium Penelitian Tanaman Pangan IV di Bogor (22-24 November 1999)
- Sudaryanto, T., Y. Yusdja, E. Basunodan Saptana. 1999. *Analisis Kebijakan Industri Ayam Ras Setelah Krisis Moneter*. Makalah. Dipresentasikan pada Seminar Nasional Peternakan dan Veteriner di Bogor (1-2 Desember)

Dokumen :

- Dinperindagkop Kabupaten Purbalingga. 2010. *Laporan Akhir Profil UMKM Kabupaten Purbalingga*. Purbalingga : Dinperindagkop Purbalingga
- Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. 2010. *Profil Industri Kecil Menengah (IKM) Rambut*. Purbalingga : Dinperindagkop

Internet :

Anonim. Eprints.walisongo.ac.id/761/4/082411129_Bab3.pdf. diunduh pada 27 Januari 2015.
Pukul 23.23

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/Ot.201/10/97 Pasal 1
Ayat 3 Tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian.

Media Masa :

Koran Sore Harapan. *Rambut Membawa Berkah*. 3 September 2003